



Manajemen Pembiayaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) di Sekolah Dasar Kota Tasikmalaya

**Karinta Utami^{1*}, Ema Astri Muliasari², Cicin S.F. Firizki³,
Nuryanti Surastr⁴, Risbon Sianturi⁵, Lutfi Nur⁶**

¹S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: karintautami@upi.edu

²S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: astriema27@upi.edu

³S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: cicinsff85@upi.edu

⁴S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: surastrinuryanti88@yahoo.com

⁵S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: risbonsianturi@upi.edu

⁶S2-PGSD/Universitas Pendidikan Indonesia-Tasikmalaya
Email: lutfinur@upi.edu

Abstract. *The implementation of the National Assessment (AN) at the elementary school (SD) level in Indonesia is the first to be implemented in 2021. This is a challenge for every educational unit, especially regarding the financial aspect of the implementation of AN. The school unit implements AN, the first is to organize independently, and the second is to ride or share resources. In this research, we will take a case study of one school that organizes AN independently and one school that chooses the boarding method. The results of the study show two challenges that must be faced by education units, namely the AN budget that has not been included in the School Activity Plan and Budget (RKAS) at the beginning of the year and the unavailability of infrastructure facilities for the implementation of AN. The research shows an overview of the implementation of AN in the two different methods seen from the aspect of financing, so that it can be a lesson for the preparation of financing management for the implementation of AN SD in the Future.*

Keywords: *Finance Management; National Assessment; Primary School.*

Abstrak. *Pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Indonesia merupakan yang pertama kali dilakukan di tahun 2021. Hal ini merupakan tantangan bagi satuan pendidikan, terutama mengenai aspek pembiayaan pelaksanaan AN. Pada penelitian ini kami melakukan analisis manajemen pembiayaan pada pelaksanaan UN SD di dua jenis metode pelaksanaan AN, yaitu sekolah yang melaksanakan secara mandiri dan yang memilih metode menumpang. Hasil dari penelitian ini bahwa tantangan yang dihadapi kedua jenis sekolah adalah bahwa biaya pelaksanaan DAN belum termasuk dalam RKAS di awal tahun pendidikan dan belum tersedianya fasilitas yang memadai. Peneliti memberikan gambaran atas implementasi AN SD dari aspek pembiayaan dan dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan pelaksanaan di tahun berikutnya.*

Kata Kunci: *Asesmen Nasional; Manajemen Pembiayaan; Sekolah Dasar.*

PENDAHULUAN

Asesmen/penilaian adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik dan efektif kinerja peserta didik, kelas, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu (Widiana, 2016). Melalui hasil penilaian dapat dijadikan referensi tindak lanjut dan evaluasi untuk sebelum beranjak ke tahapan pendidikan yang lain. Maka proses asesmen memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan dan dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, dilaksanakan secara profesional dan objektif (Hadiana, 2015). Dengan demikian, proses asesmen akan mampu menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan menghasilkan lulusan peserta didik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil studi *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018, peringkat PISA Indonesia tahun 2018 turun apabila dibandingkan dengan hasil PISA di tahun 2015. Studi pada tahun 2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak (Tohir, 2019). Dari hasil penilaian PISA tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam aspek asesmen. Kemendikbud melakukan inovasi dan terobosan yang diperlukan untuk mempercepat proses dan melakukan lompatan di bidang pendidikan. Menurut Mendikbud, asesmen perlu dibuat agar fokus pada kompetensi mendasar yang berguna secara luas. Hasil asesmen juga akan dilaporkan dalam bentuk yang bermanfaat bagi perbaikan praktik pengajaran di kelas maupun perumusan kebijakan pendidikan.

Pada SIARAN PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019 mengenai ujian UN (Ujian Nasional), tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter” ungkap Mendikbud. Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021).

ANBK yang dinilai sebagai salah satu produk reformasi di bidang pendidikan dari pemerintah tentu memiliki cita-cita perbaikan sistem pendidikan. Hal ini perlu kita apresiasi. Namun tidak menutup kemungkinan, sebagai sebuah program baru, khususnya di jenjang sekolah dasar, pada awal pelaksanaan akan banyak tantangan yang dihadapi (Setiyowati, Suryati, & Rina, 2022). Selain kesiapan siswanya sendiri, setiap satuan pendidikan harus mempersiapkan sarana prasarana, sumber daya pengajar, dan pembiayaan untuk mendukung keberhasilan ANBK. Dalam segi kesiapan siswa, penelitian terdahulu banyak menjelaskan telah adanya pelatihan bagi peserta didik sekolah dasar di bidang teknologi dalam menyambut ANBK (Farolai & Nurjannah, 2022; Santoso, Ramdhan, & Rahayu, 2021). Permasalahan lain adalah belum dimilikinya sarana dan prasarana yang memadai. Artinya setiap satuan pendidikan harus menyiapkan biaya pendidikan untuk hal tersebut.

Biaya pendidikan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pembiayaan yang dikeluarkan baik berupa uang maupun materi lain sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan semua pihak yang terlibat di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Aisyiah, Marsyidin, & Sabandi, 2020; Matin, 2014). Pembiayaan tersebut harus dapat diatur dengan baik, dievaluasi pemanfaatannya dan dikelola secara sistematis agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Hal ini dikuatkan oleh Akdon, Dedy, dan Deni (2015: 28) yang berpendapat bahwa biaya pendidikan adalah semua aspek pembiayaan yang menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pengeluaran

dalam pembiayaan yang tidak termasuk dalam perencanaan pembiayaan harus dapat dihindari. Fattah (2017: 62) berpendapat bahwa pembiayaan sekolah adalah kegiatan meliputi usaha pencarian sumber biaya hingga bagaimana mengelola pembiayaan yang ada di tingkat satuan pendidikan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Dalam pelaksanaan ANBK tentu diperlukan biaya dan dukungan dari fasilitas yang tersedia di setiap satuan pendidikan. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kewajiban peserta didik. Persiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan ANBK di SD tentu melibatkan aspek pembiayaan di dalamnya. Biaya pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah dan dapat dikatakan bahwa tanpa adanya biaya maka proses pendidikan di sekolah tidak dapat berlangsung (Fadlia, 2018). Begitupun dalam pelaksanaan ANBK di sekolah SD yang tentu memerlukan biaya untuk penyelenggaraannya. Pembiayaan dimulai sejak usaha persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring ANBK di SD.

Tertera dalam “Lembar Tanya Jawab Asesmen Nasional” (Kebudayaan, 2021) perangkat dan infrastruktur yang harus disiapkan dalam pelaksanaan ANBK di SD diantaranya: (1) Menggunakan komputer Client Memory 2 GB, Resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 ke atas, BW 20 MBps untuk 50 peserta, (2) Tersedia jaringan internet (offline/online) dan (3) Operator teknis. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 030/H/PG.00/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021 terutama Bab IV Tentang Pelaksanaan dan Penyiapan Teknis, pelaksanaan AN menggunakan sistem ANBK dilaksanakan secara daring atau semi daring. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua metode berkaitan tentang kesiapan sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan, yaitu pelaksanaan Secara Mandiri dan pelaksanaan Berbagi Sumber Daya/*resource sharing* (menumpang)

Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orangtua, instansi lain, atau pihak lainnya. Salah satu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar adalah dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang dimanfaatkan oleh siswa, sarana dan prasarana yang penting bagi siswa selain buku mata pelajaran adalah kursi dan meja yang layak digunakan dalam pembelajaran. Jika meja dan kursi yang digunakan tidak layak, maka akan sangat mengganggu proses belajar mengajar siswa dikelas (Sulfemi, 2019). Jadwal pelaksanaan ANBK di SD yang berada di tengah waktu setelah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di awal tahun, kerap menjadi permasalahan yang dihadapi sekolah. Pihak sekolah harus mengatur ulang kembali aspek pembiayaan guna memenuhi aspek pembiayaan pelaksanaan ANBK di SD. Dalam penelitian ini akan dibahas manajemen keuangan pelaksanaan ANBK pada 2 sekolah dengan sistem yang berbeda yaitu mandiri dan *sharing resources* / menumpang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan gambaran kondisi sebenarnya mengenai manajemen pembiayaan pelaksanaan ANBK di SD, tantangan yang dihadapi dan bagaimana rekomendasi guna meningkatkan kinerja pembiayaan di kemudian hari.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian untuk menggambarkan realitas yang kompleks melalui instrumen penelitian wawancara, penelaahan dokumen, observasi dan catatan lapangan, dalam penelitian ini kami melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara di dua sekolah dasar di Kota Tasikmalaya (Sugiyono, 2019). Pemilihan dua SD didasarkan pada adanya dua metode pelaksanaan AN, yaitu secara mandiri dan menumpang untuk memberikan gambaran bagaimana manajemen keuangan terhadap persiapan dan

pelaksanaan AN di SD Kota Tasikmalaya. Penelaahan dokumen kami lakukan dengan melihat dokumentasi terkait peraturan pelaksanaan AN di SD di Indonesia dan dokumen RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian kali ini kami mengambil masing-masing satu sampel untuk sekolah yang melaksanakan AN, khususnya AKM dengan mandiri dan menumpang di Kota Tasikmalaya. Kami membagi pembahasan menjadi tiga bagian yaitu (1) Ketersediaan sarana dan prasarana AN di kedua sekolah dan (2) Aspek pembiayaan AN di kedua sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada kepala sekolah dan bendahara di kedua sekolah, maka didapat beberapa data yang dapat dilihat pada tabel 1 mengenai ketersediaan sarana ANBK dan Tabel 2 mengenai aspek pembiayaan ANBK.

Tabel 1. Ketersediaan sarana ANBK di sekolah mandiri dan menumpang.

	Sekolah sistem mandiri	Sekolah sistem menumpang
Kepemilikan laboratorium komputer	Tidak	Tidak
Jumlah komputer utama/ Proktor untuk Moda Pelaksanaan ANBK Online/Semi Online	1	1
Jumlah ketersediaan komputer/laptop klien sesuai spesifikasi (Milik sekolah)	6	2
Jumlah ketersediaan komputer/laptop klien sesuai spesifikasi (Bukan Milik Sekolah)	5	0
Jumlah komputer/laptop yang tidak sesuai spesifikasi	0	3
Sumber listrik yang digunakan di sekolah?	PLN	PLN
Daya listrik yang digunakan di sekolah?	1200	900
Jaringan internet yang digunakan?	Indihome	Biznet
Nama sekolah tempat menumpang, dan berapa jarak dengan sekolah Bapak/Ibu	-	SMPN berjarak 500 m

Tabel 2. Aspek Pembiayaan ANBK.

Pertanyaan	Sekolah sistem mandiri	Sekolah sistem menumpang
Apakah pelaksanaan AN ini telah Bapak/ibu anggarkan di tahun ini?	Ya	Ya
Berdasarkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah, apakah hal tersebut sudah memadai untuk dilaksanakan AN?	Belum	Belum
Jika sudah, biaya apa saja yang telah dianggarkan selama persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ANBK?	Pembelian buku latihan AKM	Belum
Jika belum, apa saja yang belum dianggarkan sesuai kebutuhan ANBK?	Penambahan laptop, honor dan konsumsi proktor, pengawas dan panitia AN, dan biaya administrasi	Biaya MoU dengan sekolah <i>resourcing source</i>

Pertanyaan	Sekolah sistem mandiri	Sekolah sistem menumpang
Untuk mengatasi kekurangan biaya untuk keperluan ANBK, dari manakah sekolah mengatasinya?	Pengalihan anggaran	Menggunakan dana lainnya
Untuk mengatasi ketidak sesuaian dengan RKAS terkait keperluan ANBK bagaimana pihak sekolah mengatasinya?	Dimasukan ke dalam RKAS perubahan	Dimasukan ke dalam RKAS perubahan

Pembahasan

Berdasarkan hasil pada tabel 1 dapat diketahui di kedua sekolah baik yang mandiri ataupun menumpang belum memiliki laboratorium komputer. Sekolah dasar yang menjadi objek penelitian kami keduanya merupakan sekolah dasar negeri. Padahal laboratorium komputer di jenjang sekolah dasar akan dapat memberikan manfaat serta kemudahan dalam pembelajaran di masa sekarang, terlebih sejak diterapkannya assessment nasional berbasis komputer saat ini. Pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan dan korelasi positif antara ketersediaan laboratorium komputer dengan kemandirian belajar dan motivasi belajar peserta didik di Sekolah Dasar (Pramesthi, 2014). Berdasarkan hal tersebut, untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional, laboratorium komputer bisa menjadi salah satu prioritas alokasi anggaran sekolah disesuaikan kepada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Jumlah ketersediaan laptop milik sekolah pun sangat terbatas pada dua sekolah yang kami teliti. Pada sekolah mandiri kekurangan jumlah laptop disiasati dengan melakukan pinjaman laptop kepada pihak-pihak seperti orang tua dan guru hingga jumlah mencukupi (11 laptop sesuai spesifikasi yang diminta). Berdasarkan kecukupan laptop di SD tersebut, akhirnya dipilihlah metode mandiri dalam pelaksanaan AN. Kepemilikan laptop bagi sebuah satuan pendidikan di level sekolah dasar dapat membantu proses pembelajaran dan memberikan kemudahan bagi kinerja guru. Guru dapat memanfaatkan laptop selama proses pembelajaran sebagai sarana penyimpanan data digital dan juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di kelas (Sinaga, 2020). Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait tanggung jawab kepada pihak-pihak yang meminjamkan laptop dan memastikan laptop dalam kondisi baik saat dikembalikan. Hal ini penting juga disampaikan kepada peserta didik saat pelaksanaan AN untuk selalu menjaga dengan baik laptop yang disediakan.

Sedangkan dalam kasus sekolah yang menumpang mengalami kekurangan laptop, yaitu hanya memiliki 2 laptop yang sesuai spesifikasi. Hal ini disiasati oleh sekolah dengan pemilihan metode menumpang yaitu menggunakan fasilitas laboratorium sekolah lain yang terdekat. Pada kasus ini sekolah menumpang yang kami teliti melakukan *resourcing source* ke sekolah menengah pertama yang jaraknya hanya 500 m dari lokasi sekolah, sehingga menekan biaya transportasi siswa. Pada pelaksanaan metode ANBK secara menumpang banyak ditemui kasus sekolah yang ditumpangi adalah sekolah menengah pertama. Hal ini terjadi dikarenakan pada jenjang sekolah menengah pertama, laboratorium komputer sudah menjadi prioritas sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh satuan pendidikan guna meningkatkan efektivitas pembelajaran (Dea Ananda Putri, 2020). Namun bukan tanpa tantangan pemilihan metode menumpang ini, perlu adanya alokasi waktu dan tenaga bagi sekolah menjalin komunikasi kepada pihak sekolah yang diajukan kerja sama dalam pelaksanaan AN.

Pada hasil pemantauan pelaksanaan ANBK, perlu adanya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung ANBK perlu dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan ruang laboratorium IT minimal satu unit dalam satu gugus sekolah (Ahmad, 2022). Dalam pelaksanaannya pengadaan perangkat komputer/laptop dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana BOS yang telah diberikan. Selain diperlukannya laptop sebagai alat utama pelaksanaan ANBK, pembiayaan terkait penambahan jaringan internet pun dihadapi oleh sekolah yang memilih metode pelaksanaan secara mandiri. Dalam penelitian ini di sekolah mandiri dilakukan penambahan kapasitas internet menjadi 50 Mbps dari 20 MBps dan tentu memerlukan dana untuk hal tersebut. Terlebih internet sudah menjadi kebutuhan yang penting, apalagi semenjak pandemi COVID-19, terjadi peningkatan kebutuhan akses internet di bidang

pendidikan. Kini pemanfaatan ruang digital untuk bidang pendidikan semakin meningkat. Selain guna memenuhi persyaratan pelaksanaan ANBK, internet di lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik untuk mendukung pembelajaran, yaitu agar mudah mencari materi dan referensi pelajaran (Kurniawan, Dahlan, & Rofiah, 2020). Dalam hal penyediaan saluran listrik, di kedua sekolah tidak diperlukan penambahan jaringan listrik karena telah mencukupi. Karena kedua sekolah yang kami teliti berada di Kota Tasikmalaya dan memiliki akses listrik yang mudah maka hal ini tidak menjadi masalah, namun untuk sekolah-sekolah dengan akses jaringan listrik terbatas tentu akan menimbulkan permasalahan berbeda, apalagi listrik merupakan hal paling vital dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi (Manik, 2022).

Sistem biaya pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem biaya pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah (Abdussalaam, 2019). Dalam hal pembiayaan ANBK pun dapat berbeda tergantung kondisi masing-masing sekolah. Mulai dari perencanaan keuangan, menentukan prioritas anggaran, menentukan metode pelaksanaan ANBK yang dipilih, termasuk upaya untuk mendapatkan pembiayaan yang memungkinkan dilakukan.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan demi kelancaran pendidikan sekolah meliputi kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran agar semua kegiatan berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai cita-cita pendidikan (Aisyiah et al., 2020). Dalam hal pelaksanaan ANBK, sumber biaya utama adalah dari dana BOS. Hasil wawancara pada kepala sekolah dan bendahara di kedua sekolah pada penelitian kami menghasilkan data pada Tabel 2. Baik sekolah yang menggunakan metode mandiri maupun menumpang sebelumnya belum pernah melakukan ANBK karena ANBK SD baru dimulai pada tahun 2021. Hal baru yang harus disikapi secara bijak oleh tak hanya satuan pendidikan saja, namun semua lini pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan ANBK SD di kedua sekolah belum memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Kekurangan tersebut fokus utama adalah ketersediaan laptop atau komputer yang sesuai dengan spesifikasi.

Selain itu masalah yang dihadapi oleh kedua sekolah saat pelaksanaan ANBK adalah belum masuknya anggaran ANBK ke dalam RKAS tahun 2021. Permendikbud RI No. 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Pasal 12 (1) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen yang dibiayai oleh Dana BOS Reguler. Hal ini cukup menimbulkan masalah karena program ini baru keluar bulan Februari 2021 sedangkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun di awal tahun anggaran atau sekitar bulan Januari setiap tahunnya. Sedangkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Asesmen Nasional baru keluar bulan Juli 2021. Sehingga dalam realisasinya RKAS tersebut harus mengalami revisi atau perubahan. Hal ini diperbolehkan karena berdasarkan Permendikbud RI No. 6 Pasal 12 (2) bahwa Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Saat penyusunan RKAS di awal tahun anggaran 2021 di kedua sekolah sudah memasukan pos anggaran untuk persiapan pelaksanaan ANBK. Namun yang dimasukkan adalah hanya anggaran untuk pembelian buku latihan soal AKM, hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis serta POS (Prosedur Operasional Standar ANBK) dari pemerintah pusat. Baru di Bulan Juli 2021 petunjuk teknis dan POS ANBK diterbitkan. Hal ini menjadi tantangan bagi satuan pendidikan dikarenakan, target pelaksanaan ANBK adalah Bulan November 2021 dengan persiapan telah dimulai dari Bulan September 2021. Artinya pihak sekolah memiliki waktu cukup singkat untuk mempersiapkan terlaksananya ANBK SD di November 2021. Untuk sekolah mandiri membutuhkan anggaran terkait pelaksanaan ANBK yaitu untuk penambahan laptop, honor dan konsumsi proktor, pengawas dan panitia AN, dan biaya

administrasi, sedangkan sekolah yang menumpang membutuhkan dana untuk pembayaran MoU dengan pihak sekolah yang ditumpangangi.

Dengan beberapa hal di atas, di sekolah mandiri dilakukan revisi atau penyesuaian dalam dokumen RKAS perubahan. Mengingat pentingnya sarana prasarana komputer tersebut untuk pendidikan di SD mandiri memutuskan untuk membeli komputer baru sebanyak 4 buah. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah sekitar Rp 51.575.500,-. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit dan memerlukan analisis yang tinggi dalam memasukkannya dalam RKAS perubahan. Mengingat dana terkait sarana prasarana ini belum dimasukkan dalam RKAS tahun 2021 ini. Selain itu, biaya yang telah dianggarkan terkait Asesmen Nasional ini masih berupa biaya pokok bulanan yang telah dianggarkan saat persiapan ANBK meliputi: pembayaran listrik dan internet. Transport siswa dan pendamping pada saat pelaksanaan, sewa ruang (menumpang), dan pembelian buku latihan soal AKM. Sedangkan biaya pelaksanaan, pembelian kekurangan laptop, transportasi, simulasi siswa dan pendamping, insentif pengawas, proktor dan teknisi itu belum dimasukkan dalam RKAS. Sehingga dilakukan perubahan anggaran pada RKAS. Hal berbeda kami temui di sekolah dengan metode menumpang, dengan belum masuknya anggaran AN dalam RKAS di tahun 2021, maka pihak sekolah melakukan berbagai upaya agar ANBK dapat tetap terlaksana yaitu dengan menggunakan dana dari sumber lainnya. Selain itu dilakukan RKAS perubahan dengan memasukkan anggaran terkait biaya MoU dengan sekolah *resourcing source*.

Berkaitan dengan hal di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada saat awal tahun anggaran dalam standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Aisyiah, Marsyidin, & Sabandi, 2020). Di awal tahun, setiap satuan pendidikan harus menyusun RKAS yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dalam masa penyusunan dokumen tersebut harus dimulai dengan identifikasi setiap rencana kegiatan serta tujuan dan kesesuaian dengan VISI MISI sekolah. Hal ini berimplikasi pada proses penyusunan skala prioritas terhadap program-program mana saja yang akan didahulukan dari segi anggaran, dan persiapan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan ANBK harus mulai diprioritaskan di tahun selanjutnya (Azhariadi, Harapan, & Happy Fitria, 2020). Selain itu pemahaman dan keterampilan peserta didik di bidang teknologi harus mulai diperhatikan untuk menyongsong pelaksanaan ANBK selanjutnya (Setiyowati et al., 2022). Hal ini sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan ANBK pada tahun pertama ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan terdapat dua masalah utama yang dihadapi oleh sekolah baik yang memilih sistem mandiri maupun menumpang, yaitu: belum masuknya anggaran AN dalam RKAS di awal tahun sehingga membutuhkan penyesuaian kembali dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ANBK. Dari hasil penelitian kami bisa digunakan untuk melihat gambaran yang terjadi sehingga dapat dilakukan evaluasi serta persiapan terkait anggaran yang lebih baik dalam pelaksanaan ANBK di sekolah dasar di masa yang akan datang. Selain itu, perlu adanya pedoman khusus tentang petunjuk teknis terutama di tingkat sekolah terkait anggaran untuk Asesmen Nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. (2022). Pemantauan Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Sekolah Dasar Binaan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021. *Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 9 (1), 34–44.
- Aisyiah, S., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar. *Edukatif Jurnal Pendidikan*, 2(2), 153–157. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.121>
- Aisyiah, S., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar.

Edukatif Jurnal Pendidikan, 2 (2), 153–157. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.121>

- Akdon, dkk. 2015. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azhariadi, Harapan, E., & Happy Fitria. (2020). Manajemen pembiayaan bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Indralaya. *Cahaya Pendidikan*, 6 (1), 68–79.
- Dea Ananda Putri. (2020). *Efektivitas pemanfaatan laboratorium komputer pada pembelajaran TIK di kelas VIII SMP Negeri 4 Padang. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.* Universitas Negeri Padang.
- Farolai, N., & Nurjannah. (2022). Pelatihan Dasar-Dasar Komputer Sebagai Persiapan Menyambut Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer Pada Siswa SD Negeri 218 Congkoe. *Informatika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1).
- Hadiana, D. (2015). Penilaian Hasil Belajar Untuk Siswa Sekolah Dasar Assessment Of Learning Outcomes For Elementary School Students, 15–26.
- Kurniawan, M. R., Dahlan, U. A., & Rofiah, N. H. (2020). Pola penggunaan internet di lingkungan sekolah dasar se-kota yogyakarta. *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 02(02), 93–108.
- Manik, M. (2022). Kesiapan siswa dalam menghadapi Asesmen Nasional berbasis komputer. *Asatiza : Jurnal Pendidikan*, 3(1), 1–10.
- Santoso, Ramdhan, W., & Rahayu, E. (2021). Pelatihan keterampilan dasar menggunakan komputer pada persiapan pelaksanaan unbk sd muhammadiyah i kisaran tahun 2021. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, 1(2).
- Setiyowati, H., Suryati, E., & Rina. (2022). Analisis pelaksanaan Asesmen Nasional berbasis Komputer (ANBK) di madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Hulu Sungai Utara. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 803–818. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1086>
- Sinaga, I. S. (2020). *Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh guru sekolah dasar.* Universitas Jambi.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sulfemi, W. B. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, (106).
- Tohir, M. (2019). Hasil PISA Indonesia Tahun 2018 Turun Dibanding Tahun 2015, 2018–2019.
- Widiana, I. W. (2016). Pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran ipa di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5 (2), 147–157.